# Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Sepakat Perangi Segala Bentuk KKN

**Rabu, 6 November 2024**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan DPRD setempat menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penandatanganan ini dilakukan di tengah-tengah sosialisasi anti korupsi KPK RI. Pakta integritas berisi 7 poin, meliputi komitmen untuk tidak terlibat dalam KKN, bersikap transparan dan akuntabel, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemkab telah melakukan berbagai upaya pencegahan KKN, seperti MoU APIP dan APH, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli, dan Unit Pemberantasan Gratifikasi (UPG). Pemkab juga telah mengimplementasikan monitoring center for prevention KPK RI dan melakukan inovasi pelayanan publik untuk mencegah korupsi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD siap mendukung langkah ini dan bersinergi untuk memerangi KKN. Penandatanganan Pakta Integritas ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Kabupaten Pasuruan.

Kehadiran perwakilan KPK RI dalam acara tersebut menunjukkan dukungan kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPK RI diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pihak tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.

Dengan komitmen bersama dari Pemkab Pasuruan dan DPRD setempat, diharapkan pencegahan dan pemberantasan KKN di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*